

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023



Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
Jln. Basuki Rahmat No.78 Lantai III Samarinda
2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan hidayahNya khususnya nikmat sehat, maka Rankhir Perubahan Rancangan Awal Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2022 dapat terselesaikan. Penyusunan Rankhir Perubahan Renja tahun 2022 ini berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Rankhir Perubahan Renja ini memuat target, tujuan, sasaran, program serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Perubahan Ranwal Renja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran tujuan yang ditetapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2022 dan semua pihak yang telah turut membantu penyelesaian laporan ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat serta merupakan laporan yang akurat dalam menentukan kebijakan serta diharapkan menjadi umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan.

Samarinda, Agustus 2022
KEPALA,

M. WAHYONO HADIPUTRO, SH
NIP. 19641224 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnaker Tahun 2021	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA	
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023	34
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V : PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Ranwal Renja OPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2023. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2025 Kota Samarinda.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) tahun 2023

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.08 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
4. Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJP Kota Samarinda tahun 2005-2025;
5. Keputusan Walikota Nomor 130-05/199/HK-KS/IV/2016 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
10. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2023.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rankhir Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rankhir Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan Rankhir Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Rankhir Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2023.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

Menggambarkan kajian terhadap evaluasi renja tahun 2021 dan capaian renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnaker Tahun 2021 Dan Capaian Renja Disnaker memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disnaker Kota Samarinda Tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Disnaker Kota

Samarinda Tahun 2021-2025 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada BPBD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

4.1. Progam dan Kegiatan Tahun 2022

Pada Bagian ini menjelaskan uraian rencana program, kegiatan, indicator kinerja beserta target capaian kinerja OPD pada tahun 2022 beserta pagu indikatif anggarannya dan di tahun 2023 yang akan datang mengenai program dan kegiatannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja

Tabel 3.8 .Realisasi Rutin Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2021
 Anggaran keuangan untuk belanja rutin Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2021 sebesar **Rp.7.860.874.860,-(Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah))** namun terjadi perubahan pada APBD-P 2021 menjadi Rp. **7.644.195.160,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh rupiah)**, dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Rutin DISNAKER Kota Samarinda Tahun 2021

No	Kegiatan	Dana	Realisasi s/d Triwulan 2021	%
A	BelanjaRutin			
1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	5,329,966,000	5,313,267,058	99,69
2	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	851,848,472	834,048,472	97,91
3	Penyedia Bahan Logistik Kantor	27,748,495	24,884,470	99,95
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	107,199,460	101,393,000	94,58
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	52,554,900	45,114,000	85,84
6	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan kantor	9,892,652	5,500,000	55,60
7	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi	99,809,000	74,629,200	74,77
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	624,000,000	493,909,902	79,15
9	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	85,410,000	7,829,000	91,67
10	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83,711,200	5,054,297	6,04
11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	300,504,981	277,845,500	92,46
12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagungan lainnya	71,550,000	54,737,500	76,50
	Jumlah	7,644,195,160	7,238,212,399	94,689

Anggaran Belanja Kegiatan Dinas Tenaga Kota Samarinda sebesar Rp. 1.858.170.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) namun mengalami Perubahan menjadi Rp 1.792.550.000 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah*) dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2021

No	Kegiatan	Dana	Realisasi s/d Triwulan IV 2021	%
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, dan EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,000,000	89,250,000	89.25
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	285,358,000.00	274,846,000.00	96.32%
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	210,379,000.00	195,185,000.00	92.78%
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	122,680,000.00	116,604,500.00	95.05%
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	600,000,000.00	416,293,000.00	69.38%
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	34,580,000.00	34,580,000.00	100.00%
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	176,723,000.00	176,428,700.00	99.83%
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	262,830,000.00	236,300,300.00	89.91%
	Jumlah	1,792,550,000	1,539,487,500	85.88 %

A. Permasalahan

Indeks Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda masih dapat ditingkatkan secara optimal dalam mencapai keberhasilan implementasi program-program kegiatan.

Masih ada beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap keadaan ketenagakerjaan di Kota Samarinda, sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan penganggaran.
2. Kendala dalam menyalurkan pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda :
 - a. Banyak lowongan pekerjaan yang minim peminat.
 - b. Pencari kerja belum memiliki keterampilan dan pengalaman pekerjaan yang dibutuhkan pengguna tenaga kerja.
 - c. Banyaknya pendatang dari luar Samarinda bahkan dari luar Kalimantan Timur yang mengadu nasib di Kota Samarinda.
 - d. Masih rendahnya kualitas Tenaga Kerja dan Pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan menyebabkan perusahaan mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah.
3. Penyampaian informasi ke pencari kerja yang kurang maksimal karena kurangnya sosialisasi ke pencari kerja mengenai website Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda yang berisi lowongan kerja dari berbagai perusahaan.
4. Pengantar kerja kesulitan untuk menyalurkan dan memonitor lowongan yang tersedia baik mekanisme recruitment maupun pelaporan karena para pengusaha / pengguna tenaga kerja belum seluruhnya menaati aturan Kepres No.04 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan karena kurangnya sosialisasi dan tidak adanya sanksi yang tegas.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas operasional, juga sarana untuk pelatihan dan bimbingan tenaga kerja karena peralatan yang ada sudah tidak sesuai dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat dinamis dengan inovasi tinggi.
6. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki pendidikan, keterampilan dan berkualitas serta memiliki kapabilitas untuk melaksanakan tugas dengan efektif

dan efisien apabila dibandingkan dengan tupoksi dan jumlah perusahaan serta tenaga kerja yang harus ditangani.

7. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda masih membutuhkan tenaga Fungsional seperti Pengawas, Mediator dan Pengantar Kerja yang perannya sangat signifikan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.
8. Dana anggaran yang masih belum mencukupi untuk mengembangkan kegiatan dan cakupan program yang dapat dilaksanakan.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, Dinas Tenaga kerja Kota Samarinda berinisiatif mengambil upaya sebagai berikut :

1. Menyiapkan program-program unggulan untuk menanggulangi dampak pandemic Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Kota Samarinda.
2. Malakukan kerjasama degan pihak ke-3 melalui CSR untuk pelaksanaan kegiatan sehingga dapat membuat inovasi-inovasi tanpa penggunaan APBD Kota Samarinda.
3. Perlu disiapkan dan dimonitor secara optimal kesempatan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja, antara lain sektor industri pengolahan, perdagangan, perhubungan/angkutan dan jasa kemasyarakatan untuk lebih ditingkatkan melalui sektor informal/usaha mandiri seperti kewirausahaan dan padat karya.
4. Meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas serta kapabilitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam rangka pembekalan keterampilan pencari kerja melalui lembaga swasta dan pemerintah.
5. Mempercepat penyebaran informasi pasar kerja secara online melalui website, bursa kerja sehingga lebih optimal mempertemukan pengguna tenaga kerja dengan pencari kerja.
6. Melakukan monitoring rutin ke perusahaan-perusahaan untuk meminimalisasi potensi konflik dan masalah ketenagakerjaan serta berkoordinasi dengan instansi terkait.
7. Membuat inovasi layanan digital untuk megurangi kegiatan tatap muka di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Tahun Berjalan

Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2021)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
DINAS TENAGA KERJA									
Pelayanan Administrasi Perkantoran									
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Bukti Pembayaran	48 Bukti Pembayaran	48 Bukti Pembayaran	48 Bukti Pembayaran	100%	48 Bukti Pembayaran	144	300
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	15	300
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12	300

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	6	300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	6	300
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300	300
Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya Makan dan Minum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300	300
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300	300
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300	300

Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan dan peralatan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300	300
Peningkatan Disiplin Aparatur									
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja									
<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	<i>Terlaksananya Pelatihan Pemagangan Berbasis Kompetensi</i>	<i>40 Peserta</i>	<i>50 Orang</i>	<i>50 Peserta</i>	<i>50 Peserta</i>	<i>100%</i>	<i>40 Peserta</i>	<i>140</i>	<i>350</i>
<i>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</i>	<i>Jumlah Perusahaan yang melaksanakan program pemagangan</i>	<i>12 Perusahaan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12 Perusahaan</i>	<i>12</i>	<i>100</i>
<i>Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</i>	<i>Jumlah UMKM, Jumlah Peserta Pelatihan Produktivitas</i>	<i>50 Orang</i>	<i>50 Orang</i>	<i>50 Orang</i>	<i>50 Orang</i>	<i>100%</i>	<i>50 Orang</i>	<i>150</i>	<i>300</i>
Peningkatan Kesempatan Kerja									

<i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>	<i>Informasi lowongan dan Penempatan pencari kerja Tersedia</i>	<i>700 Orang</i>	<i>1000 Orang</i>	<i>700 Orang</i>	<i>700 Orang</i>	<i>100%</i>	<i>700 Orang</i>	<i>2400</i>	<i>342.86</i>
<i>Koordinasi dan Singkronisasi Perancangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Data Penempatan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing, dan Penyandang Cacat</i>	<i>125 Dokumen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>125 Dokumen</i>	<i>125</i>	<i>100</i>
<i>Penyedia Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja</i>	<i>Terbukanya Peluang Kesempatan Kerja dan Berkurangnya pengangguran</i>	<i>320</i>	<i>80 Orang</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>320</i>	<i>400</i>	<i>125</i>
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga KetenagaKerjaan									
<i>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Kasus</i>	<i>40 Kasus</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>40 Kasus</i>	<i>40 Kasus</i>	<i>100%</i>

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
<i>Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan</i>	<i>Dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>21</i>	<i>300</i>

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama, Standar Pelayanan Minimal daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan OPD dalam melaksanakan pembangunan setiap tahunnya yang meliputi 5 aspek utama yang dijadikan tolak ukur kinerja OPD, namun sepanjang tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tidak lagi menjadi pengampu SPM.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya. Maka isu-isu strategis yang akan direspon oleh Dinas dalam perencanaan di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran cukup tinggi.
2. Belum optimalnya produktivitas Angkatan kerja.
3. Masih belum optimalnya Kesehatan kerja dan keselamatan kerja.
4. Masih belum optimalnya kualitas Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Rendahnya kemandirian masyarakat transmigran, di indikasi oleh masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat transmigran.
6. Masih belum optimalnya kompetensi lulusan BLK dan pelayanan BPPD dalam mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
7. Masih belum optimalnya kualitas tata laksanakan teruntuk akuntabilitas kinerja pelayanan.
Diindikasikan oleh masih belum optimalnya penyelenggaraan sop pelayanan administratif.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Administrasi Umum Perangkat daerah					Administrasi Umum Perangkat daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	92000000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	52,585,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	150000000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	53,375,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah peralatan rumah tangga	1	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah peralatan rumah tangga	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah bahan logistik	1	20000000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah bahan logistik	5	27,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	210	62000000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	210	100,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18000	108000000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18000	54,500,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah tamu yang berkunjung	15	62000000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah tamu yang berkunjung	15	27,218,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah SPPD	20	200000000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah SPPD	20	99,000,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Arsip dinamis yang di arsipkan	1	20000000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Arsip dinamis yang di arsipkan		0
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diantar	10	10000000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diantar	10	3,329,000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	60	1000000000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Tagihan Rekening yang Dibayarkan		870,000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14	100000000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14	100,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Tagihan jasa pelayanan umum	30	200000000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Tagihan jasa pelayanan umum	30	296,581,000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	30	135000000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	10	135000000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	1	50000000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	10	84100000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin	63	168230000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin	30	168230000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	45	486820000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	2	105504000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	2	70000000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	2	71550000
5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	100	600000000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keetrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Samarinda	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	100	156431650
	Pelaksanaan konsultasi produktifitas kepada perusahaan kecil		Jumlah perusahaan kecil yang dibina	50	200000000	pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Samarinda	Jumlah perusahaan kecil yang dibina	50	2335650
6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				
	Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari Kerja yang dilayani melalui Pasar Kerja Online	900	150000000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Samarinda	Jumlah Pencari Kerja yang dilayani melalui Pasar Kerja Online	900	28381500

						Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Izin perpanjangan IMTA	125	50000000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Izin perpanjangan IMTA	125	5388150
7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota				
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah Perusahaan yang dimonitor	80	200000000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Samarinda	Jumlah Perusahaan yang dimonitor	80	121282000
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	60	100000000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Samarinda	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	60	28223000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Lembaga Kerjasama Tripartit yang difasilitasi	1	100000000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Samarinda	Lembaga Kerjasama Tripartit yang difasilitasi	1	250205000
8						PERENCANAAN, PENGANGGARAN, dan EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	45358950
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah LAKIP	1	44990000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Tidak terdapat usulan masyarakat maupun proposal permintaan kegiatan dari masyarakat ke Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagai mana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif sesuai dengan visi misi.

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan beban ketergantungan yang cenderung semakin tinggi, maka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan dengan memanfaatkan bonus kependudukan di sektor yang dapat menghasilkan kemandirian perekonomian nasional.

Kondisi masa depan yang ingin diwujudkan (Visi) oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2019 – 2023 sebagai kebijakan nasional adalah: "**Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, secara umum, upaya-upaya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja
2. Peningkatan kompetensi ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
4. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan
5. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan
6. Penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance), yang didukung oleh penelitian, pengembangan dan pengelolaan informasi yang efektif.

Arah kebijakan dan prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak (*decent work*), yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
2. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
4. Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;
5. Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
7. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
8. Menyempurnakan kebijakan migrasi;
9. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Walikota dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang lebih berhasil dan lebih maju, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan. Dengan kata lain menjadikan suatu realita antara keinginan (*das solen*) dan kenyataan (*das sein*), pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai:

1. *Idealistik* artinya suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik, dan berhasil;
2. *Jangkauan* kedepan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
3. *Abstrak*, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. *Konsisten*, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Result Timeliness*).

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas, Sasaran bersifat spesifik, terstruktur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan maupun bulanan.

Sasaran Penyelenggaraan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda akan difokuskan pada upaya tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dan mampu mendukung terwujudnya visi dari Kota Samarinda.

Renja Dinas Tenaga Kerja mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2021-2026, kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi misi. Adapun visi misi Walikota Terpilih adalah sebagai berikut :

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Samarinda adalah

“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT BERADABAN”.

Sejalan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam lima tahun masa pembangunan Kota Samarinda adalah terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Makna yang paling besar yang terdapat dalam Visi ini adalah **Kota Samarinda sebagai Kota PUSAT PERADABAN**

Menetapkan Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah-tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali. Aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah Kota Samarinda terdiri atas aspek inti (sosial, ekonomi, lingkungan) dan aspek pendukung (*Good Governance*, keuangan daerah) dengan

Kota Cerdas (*Smart City*) sebagai pondasi dalam pencapaiannya sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Samarinda 2005-2025.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Samarinda adalah:

1. *MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG RELIGIUS, UNGGUL DAN BERBUDAYA.*
2. *MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG MAJU, MANDIRI, BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN*
3. *MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI.*
4. MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MANTAP DAN MODERN.
5. MEWUJUDKAN LINGKUNGAN KOTA YANG AMAN, NYAMAN, HARMONI DAN LESTARI.

Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Samarinda adalah:

1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 Juta per RT per Tahun)
2. Program Pengendalian Banjir dan Pembangunan Sistem Drainase Modern.
3. Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan.
4. Program *Social Security Number* (Satu Kartu untuk Semua Layanan).
5. Program *Smart City Plus*.
6. Program "Doctor on Call"
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 Tahun.
8. Pengembangan Badan Usaha Milik Rt (Berbasis Kelurahan).
9. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 *playground*.
10. Program penciptaan 10.000 Wirausaha Baru (*Start Up*)

Sasaran Penyelenggaraan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda akan difokuskan pada upaya Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Unggul dan Berbudaya (Misi 1) serta Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan (Misi 2) dengan mengupayakan tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dan mampu mendukung terwujudnya visi dari Kota Samarinda.

Oleh Karena itu upaya perwujudan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam tahun 2021-2026 yang akan datang diarahkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, Terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja.

Tujuan pertama adalah terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja merupakan penjabaran dari misi pertama Membangun daya saing tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten melalui pelatihan tenaga kerja, pemagangan dan pengembangan produktivitas. Serta misi kedua Membangun Kelembagaan Pelatihan yang produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Terlaksananya Program Pelatihan dan Pemagangan berbasis Kompetensi serta Pembinaan terhadap Lembaga Latihan Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja.

2. Tujuan Kedua, Terlaksananya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja untuk mengisi kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Tujuan Kedua, Terlaksananya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja untuk mengisi kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran merupakan penjabaran dari misi ketiga Mendorong peningkatan keterampilan, kompetensi dan kemandirian Angkatan kerja dalam rangka pemenuhan lowongan kerja dan peningkatan lapangan kerja serta pengurangan pengangguran. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan Pengetahuan Tenaga Kerja serta Perluasan Kesempatan Kerja.

3. Tujuan Ketiga, Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dan dilaksanakannya syarat kerja diperusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Tujuan Ketiga, Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dan dilaksanakannya syarat kerja diperusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja merupakan penjabaran dari misi ketiga Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan dan penegakan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja, penyelesaian kasus-kasus PHI dan PHK antara pekerja/ buruh dan perusahaan.

4. Tujuan Keempat, Terlaksananya kegiatan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan program.

Tujuan Keempat, Terlaksananya kegiatan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan program merupakan penjabaran dari misi kelima Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Tersedia Informasi Data yang Akurat Untuk Perencanaan Tenaga Kerja Yang Matang.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

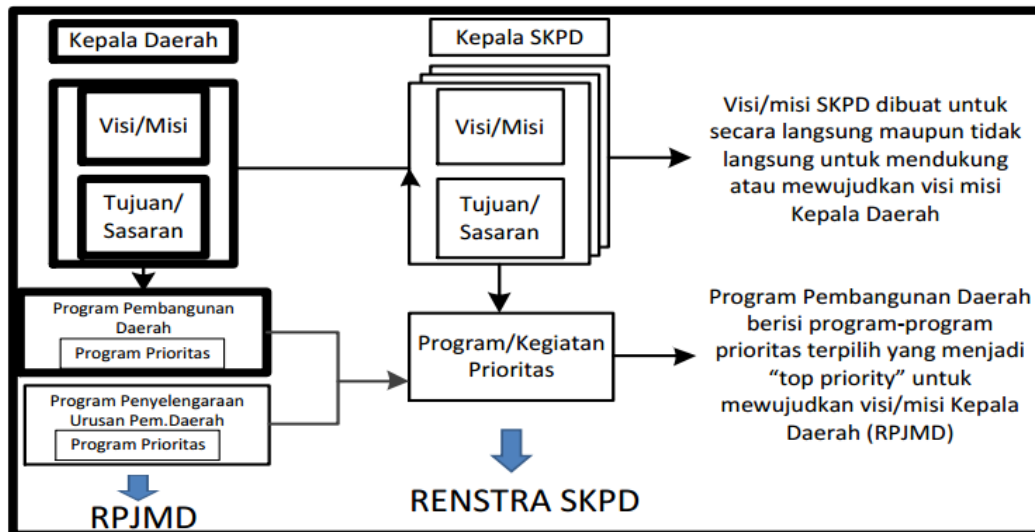
Dalam penyusunan Renstra Disnaker Kota Samarinda mengacu pada misi 1 dan 2 Walikota terpilih Kota Samarinda yaitu “**Mewujudkan masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya**” dan “**Mewujudkan Perekonomian yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.**” Dijabarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
Dengan Misi Kota Samarinda

No.	Misi Kota Samarinda	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program
1.	Mewujudkan masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya	Meningkatkan Daya Saing Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kompetensi Ketenagakerjaan	Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2.	Mewujudkan Perekonomian yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.	Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya Lapangan Pekerjaan	Pelayanan bagi Pencari Kerja.	1.Program Perencanaan Tenaga Kerja. 2.Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
			Meningkatkan Kualitas Hubungan Tripartit dan Bipartit, serta meningkatkan kualitas penerapan system perlindungan tenaga kerja di perusahaan.	Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja.	Program Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Lebih jelasnya hubungan kinerja pembangunan daerah kaitan antara RPJMD Kota Samarinda dengan RENSTRA OPD diilustrasikan dalam gambar di bawah ini :



- Program merupakan bagian kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran, hampir sama dengan sasaran, Program juga bersifat spesifik, terstruktur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diwujudkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan maupun bulanan.
- Program Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam periode tahun 2023 yang akan datang dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021									Program Unggulan
Kode Rekening				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Pagu	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	150000000	
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan		
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	160 Orang	625000000	Unggulan
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan sarana Prasarana Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Pada Tahun 2023	40 Lembaga	180000000	
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	16 Unit	400000000	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	12 Lembaga	825000000	
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	30 Perizinan	250000000	
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil				
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan konsultasi produktifitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	75 Perusahaan	250000000	
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				
2	07	03	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen	175000000	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	350 Orang	260000000	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	900 Orang	150000000	
2	07	04	2.01	03	Penyuluh dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	10 Orang	50.000.000	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	700.000.000	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				

2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	100.000.000	Unggulan
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	900 Orang	150.000.000	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatka Pekerjaan melalui Job Fair/ Bursa Kerja	600 Orang	125.000.000	
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota				
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	50.000.000	
2	07	04	2.04	02	Penyedia Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	20 Orang	30.000.000	
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	20 Orang	50.000.000	
2	07	04	2.05		Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota				
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		130 Dokumen	75.000.000	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroprasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota				
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan	100.000.000	
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjajinan Kerja Bersama	6 Perusahaan	100.000.000	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	35 Laporan	115.000.000	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota				
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan ang Dicegah	90 Perkara	210.000.000	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perkarkara Perselisihan yang terselesaikan	75 Perkara	115.000.000	
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Srikat Pekerja yang Diverifikasi	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000	
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kebupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	100.000.000	

2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	100.000.000	
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota				
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.000.000	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
2	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	5.977.699.000	
2	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	787.516.000	
2	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	
2	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	50.000.000	
2	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Lainnya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	83 Paket	10.000.000	
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	250.000.000	
2	07	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	250.000.000	
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	250.000.000	
2	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	5.000.000	
2	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	
2	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pelatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	10.000.000	
2	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Disediakan	5 Paket	27.000.000	
2	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	220 Paket	100.000.000	
2	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	18.500 Dokumen	54.500.000	
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	27.218.000	
2	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	99.000.000	

2	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000		
2	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	25.000.000		
2	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	25.000.000		
2	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000		
2	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disdiakan	1 Unit	150.000.000		
2	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000		
2	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	10.000.000		
2	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000		
2	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	3.329.000		
2	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	870.000.000		
2	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lapran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	100.000.000		
2	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	225.000.000		
2	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	93.285.000		
2	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	40.000.000		
2	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 Unit	170.000.000		
2	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000		
2	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1 Unit	10.000.000		
2	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	105.504.000		
2	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	45 Unit	71,550,000		

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan bagian kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran, hampirsama dengan sasaran, Program juga bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diwujudkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan maupun bulanan.

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam periode tahun 2023 yang akan datang dan Prakiraan maju 2024 dijelaskan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021					2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	indikator	Target	Pagu	Target	Pagu
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	150000000	1 Dokumen	150000000
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan			
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	160 Orang	625000000	120 Orang	650000000
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan sarana Prasarana Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Pada Tahun 2023	40 Lembaga	180000000	25 Lembaga	180000000
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	16 Unit	400000000		
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	12 Lembaga	825000000	14 Lembaga	910000000
2	7	3	2.03	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	30 Perizinan	250000000	30 LPK	300000000
2	7	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil					
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan konsultasi produktifitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	75 Perusahaan	250000000	100 UMKM/Perusahaan Kecil	300000000
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen	175000000		
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					

2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	350 Orang	260000000	360 Orang	275000000
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	900 Orang	150000000	1000 Orang	175000000
2	7	4	2.01	3	Penyuluh dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	10 Orang	50.000.000	15 Penyuluh	100000000
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	700.000.000		
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	100.000.000	1 Aplikasi	100000000
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	900 Orang	150.000.000	1000 Orang	175000000
2	7	4	2.03	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatka Pekerjaan melalui Job Fair/ Bursa Kerja	600 Orang	125.000.000	600 Oang	150000000
2	7	4	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota					
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	50.000.000	35 Orang	75000000
2	7	4	2.04	2	Penyedia Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	20 Orang	30.000.000	30 Orang	45000000
2	7	4	2.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	20 Orang	50.000.000	30 Orang	75000000
2	7	4	2.05		Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota					
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Izin IMTA yang diperpanjang	130 Dokumen	75.000.000	135 Dokumen	100000000
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota					

2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan	100.000.000	35 Dokumen	100000000
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	6 Perusahaan	100.000.000	6 Perusahaan	100000000
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	35 Laporan	115.000.000	40 Perusahaan	125000000
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota					
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	90 Perkara	210.000.000	100 Perusahaan	225000000
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perkarkara Perselisihan yang terselesaikan	75 Perkara	115.000.000	90 Kasus	125000000
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Srikat Pekerja yang Diverifikasi	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000	25 Organisasi Pekerja/Pe ngusaha	55000000
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	110000000
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	100.000.000		
1	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota					
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.000.000	8 Dokumen	25000000

1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25000000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	25.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD			1 Dokumen	25.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	25.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP			1 Dokumen	25.000.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi			4 Dokumen	25.000.000
2	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	5.977.699.000	45 Orang	Rp8.700.000.000
2	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	787.516.000	23 Orang	Rp1.600.000.000
2	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	0	0
2	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50000000
2	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
2	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Lainnya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	83 Paket	10.000.000	83 Paket	100000000
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	250.000.000	25 Orang	250000000
2	7	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	250.000.000	0	Rp0
2	7	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	250.000.000	20 Orang	Rp250.000.000
2	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					

2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	5.000.000	3 Jenis	Rp100.000.000
2	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	5 Jenis	Rp150.000.000
2	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pelatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Buah	Rp20.000.000
2	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Disediakan	5 Paket	27.000.000	5 Jenis	Rp62.000.000
2	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	220 Paket	100.000.000	240 Dokumen	Rp115.000.000
2	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	18.500 Dokumen	54.500.000	18500 Buku/Surat Kabar	Rp135.000.000
2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	27.218.000	15 Rombongan Tamu yang berkunjung	Rp50.000.000
2	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	99,000.000	20 SPPD	Rp300.000.000
2	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	1 Arsip	Rp20.000.000
2	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	25.000.000	4 Unit	Rp1.000.000.000
2	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	25.000.000	4 Unit	Rp1.000.000.000
2	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	1 Unit	Rp50.000.000
2	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disdiakan	1 Unit	150.000.000	1 Unit	Rp200.000.000
2	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	0	Rp0
2	1	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	0	Rp0
2	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000	0	Rp0
2	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

2	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	3.329.000	10 Surat/Paket	Rp10.000.000
2	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	870.000.000	60 Bukti Pembayaran	Rp1.100.000.000
2	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	100.000.000	18 Bukti Pembayaran	Rp150.000.000
2	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	225.000.000	40 Bukti Pembayaran	Rp250.000.000
2	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	93.285.000	10 Unit	Rp180.000.000
2	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	40.000.000	10 Unit	Rp60.000.000
2	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 Unit	170.000.000	30 Unit	Rp170.000.000
2	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	0	0
2	1	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1 Unit	10.000.000	0	0
2	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	105.504.000	2 Unit	50000000
2	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	45 Unit	71,550,000	2 Jenis	120000000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Ranwal Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mendeskripsikan berbagai kegiatan yang direncanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran sebagai wujud nyata dari pelaksanaan program-program yang sesuai dengan Visi, Misi dan program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021-2025. Pelaksanaan program kerja mengacu pada tuntutan paradigma baru yang harus mengedepankan terwujudnya kesejahteraan dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

Rancangan Awal Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Diharapkan Ranwal Renja juga menjadi dasar yang kompeten dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pemutus kebijakan dalam rangka mewujudkan pencapaian target kinerja yang optimal.

Samarinda, Juli 2022

Kepala Dinas

M. WAHYONO HADIPUTRO, SH

Pembina Utama Muda IV/c

NIP.19641224 199203 1 011